



na- wa- la

Januari Edisi 1 Vol. 7

Gedung Merah Putih KPK
Lt. 1, Jalan Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950

E-mail : perpustakaan@kpk.go.id
Telp. (021) 25578300, ext. 8642
perpustakaan.kpk.go.id



buku bulan ini!

*Merawat Transparansi, Mencegah Korupsi
Keterbukaan Informasi Publik
di Indonesia*

Oscar Darmawan & Sintha Rosse

Keterbukaan informasi merupakan salah satu isu yang berkaitan erat dengan reformasi administrasi dan salah satu pilar utama demokratisasi sebuah negara. Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mendorong pemerintah yang terbuka dan transparan. Namun upaya tersebut belum mendapat hasil karena adanya mispersepsi. Persoalan transparansi sudah lama menjadi perhatian di Indonesia. Banyak dilakukan penelitian terhadap transparansi dan keterbukaan informasi untuk menambah pengetahuan serta mendorong hal baik dari adanya transparansi. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah pencegahan korupsi. Transparansi membatasi korupsi, melindungi publik dari perilaku oportunistis dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Transparansi termasuk penting dalam pemerintahan, pemerintahan yang lebih terbuka akan menjadi semakin demokratis, dan suatu pemerintahan yang lebih transparan akan bekerja dengan cara yang lebih efektif dan efisien, maka nantinya dapat memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Buku "Merawat Transparansi, Mencegah Korupsi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia" cocok untuk siapa saja yang ingin mengetahui konsep dan praktik keterbukaan publik di Indonesia, khususnya kepada para mahasiswa, dosen, peneliti dan para pejabat pada badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik secara tuntas dibahas pada buku ini. Selain itu, terdapat bukti empiris, kajian teoritis dan buah pikir penulis yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Seperti hubungannya dengan pemberantasan korupsi, kepercayaan publik dan peran sejumlah tokoh dalam keterbukaan informasi publik, antara lain dari pemerintah, non pemerintah seperti LSM, dan sivitas akademika perguruan tinggi. Menariknya dari buku ini, meskipun dibagi kedalam beberapa pokok bahasan tetapi bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga dapat dibaca oleh berbagai kalangan. Setiap pokok bahasan juga terdapat strategi untuk pemerintah daerah dan pihak non pemerintah yang dapat menjadi sebuah rujukan dan pembelajaran dari apa yang telah dilakukan yang nantinya dapat diterapkan pada masing-masing wilayahnya.

Buku ini menjadi sebuah karya yang membahas keterbukaan informasi secara luas, apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya merawat transparansi demi kebaikan bersama dan untuk mencegah korupsi, terutama di pemerintahan. Penyelenggara negara, akademisi dan pemangku kepentingan lain dapat melihat buku ini sebagai referensi untuk merefleksikan bahwa tata pemerintahan yang baik tidak lain merupakan buah dari keterbukaan informasi publik. Jadi tunggu apalagi nih, yuk pinjam buku Merawat Transparansi, Mencegah Korupsi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia ini di Perpustakaan KPK!



Penulis : Lina Miftahul Jannah, dkk
Penerbit : FIA UI Press
Tahun Terbit : 2020
Tebal Buku : xvi + 213
ISBN : 978-623-91140-6-0

Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia

Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam

Penelitian terdahulu telah mengintegrasikan theory of planned behavior dan fraud triangle. Hasil menunjukkan bahwa lemahnya hukum administrasi negara sering menimbulkan peluang terjadinya praktik korupsi. Penelitian ini menawarkan upaya pemberantasan korupsi dengan penguatan hukum administrasi negara melalui optimalisasi birokrasi. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, mengkaji hukum undang-undang dan mendeskripsikan peran dari hukum administrasi negara sebagai alternatif jitu pemberantasan korupsi. Ada berbagai upaya yang harus diaktualisasikan dalam diri birokrasi dengan penguatan hukum administrasi negara yaitu, penerapan prinsip-prinsip good governance dan closed system birokrasi dalam praktik penyelenggaraan negara; menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; penguatan hukum; perbaikan lembaga negara; meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara; membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat; serta pembentukan lembaga anti korupsi di daerah.



Pilihan Publik dalam Kasus Korupsi APBD dan Kepala Daerah

Imam Fatkuroji, Selvi Diana

Tulisan ini melakukan telaah pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi kepala daerah di Lampung Tengah (Mustafa) dan proses politik anggaran daerahnya. Telaah pilihan publik dilakukan karena keterbatasan politik model pembangunan tradisional. Pemaknaan pendekatan pilihan publik dalam politik anggaran daerah berimplikasi pada terbukanya ruang korupsi bagi kepala daerah. Kasus korupsi Mustafa memaksa banyak aktor untuk diperiksa serta membuka kasus lainnya. Interaksi Mustafa sebagai kepala daerah yang memiliki kekuasaan besar dengan swasta ketika menjabat dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung. Lingkungan demokrasi yang kuat direkomendasikan untuk mendukung peningkatan tindakan melawan korupsi di daerah.





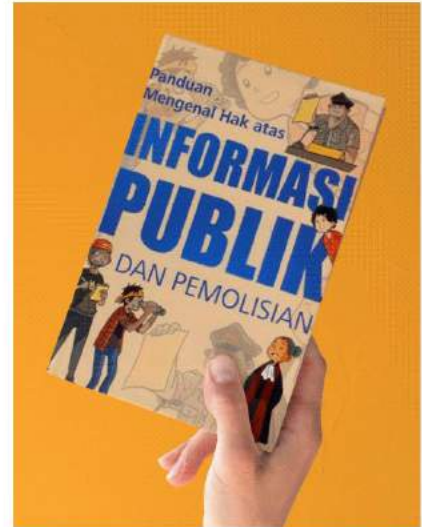
Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Panduan untuk membantu masyarakat untuk memahami tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lengkap serta permasalahan - permasalahan yang ada untuk mencegah terjadinya korupsi.



Say No to Korupsi!: Mengenal, Mencegah & Memberantas Korupsi di Indonesia

Mencari pemecahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mengatasi dilema yang menimpa masyarakat dalam memberantas korupsi menjadi tanggung jawab bersama.



Panduan Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian

Buku ini merupakan sebuah panduan untuk masyarakat terhadap informasi publik, kerangka konseptualnya dan prosedur keterbukaan informasi publik di kepolisian.



Tidak Sulit Mencegah Korupsi

Adanya berbagai kesenjangan dalam masyarakat membuka banyak celah bagi perilaku korupsi untuk melakukan tindakan korupsi.



Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014

Melawan korupsi merupakan bahan referensi penting terkait isu-isu kebijakan publik di Indonesia dengan perspektif sejarah dan politik.



Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional

Buku ini membahas mengenai bagaimana Indonesia merespon kecenderungan liberalisasi ekonomi dunia, merumuskan dan menata keterbukaan politik, menyiasati gerakan demokrasi dan tuntutan akan HAM yang semakin menguat di seluruh dunia.